



2.1 Inflasi

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Perbedaan definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi kita tentang inflasi, demikian pula dalam memformulasi kebijakan-kebijakan untuk solusinya. Namun, pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema ekonomi.

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu daerah. Sebagai suatu fenomena ekonomi, inflasi merupakan objek kajian yang sangat menarik terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Berbagai pendekatan baik nasional, regional maupun internasional terutama oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional tidak henti-hentinya memperbincangkan

inflasi dalam berbagai forum.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat. Inflasi juga merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, dan parameter ekonomi makro lainnya.

Oleh karena itu pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan kalangan perbankan sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Dalam batas wajar, inflasi bisa memberikan dampak yang positif dalam mendorong peningkatan produksi/*output*. Lebih lanjut, jika inflasi melebihi angka dua digit akan berdampak negatif, tidak hanya menurunkan nilai uang, tetapi juga dapat meningkatkan angka pengangguran, memperlebar jurang (*gap*) antara kaya dan miskin, antara pengusaha berskala besar (konglomerat) dan pengusaha berskala menengah ke bawah, antara petani pemilik lahan luas dan petani gurem, antara majikan dan pekerja, serta dapat melunturkan kepercayaan masyarakat internasional (investor) terhadap kewibawaan pemerintah suatu daerah. Para investor enggan menanamkan modalnya dan bahkan bagi yang sudah terlanjur akan merelokasi industrinya ke daerah lain yang lebih stabil dan kompetitif.

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Begitu besarnya dampak inflasi bagi perekonomian agregatif dan melibatkan banyak pihak pelaku ekonomi, sehingga penyelesaiannya juga harus bersifat agregatif, integral serta harus melibatkan berbagai pihak terutama para pelaku ekonomi swasta dan pemerintah. Di Indonesia, Pemerintah dan Bank Indonesia bekerjasama memformulasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi laju pertumbuhan inflasi.

Angka inflasi merupakan angka gabungan (*agregat*) dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual di pasar. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu angka inflasi, antara lain:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa, seperti tingkat produksi, distribusi dan stok. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang dipasar (*excess supply*) dan harga/inflasi akan turun; demikian pula sebaliknya,
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun baru,
- c. Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang dan jasa.

Inflasi jika ditinjau berdasarkan bobotnya, dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Inflasi Ringan

Inflasi ringan disebut juga *creeping inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau di bawah 10 persen per tahun.

- b. Inflasi Sedang

Inflasi sedang (moderat) adalah inflasi yang berada di antara 10–30 persen per tahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam kurun lima tahun terakhir pada inflasi Kota Tanjungpinang, pernah terjadi inflasi yang melebihi dua digit, yaitu pada tahun 2013 yang mencapai 13,31 persen pada kelompok Bahan Makanan, dan sebesar 14,26 persen pada kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

c. Inflasi Berat

Inflasi berat merupakan inflasi yang berada diantara 30–100 persen per tahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi akan hampir lumpuh total kecuali yang dikuasai oleh daerah.

d. Inflasi Sangat Berat

Inflasi sangat berat yang juga disebut *hyper inflation* adalah inflasi yang melampaui 100 persen per tahun, sebagaimana yang terjadi pada masa perang dunia II (1939 - 1945), sehingga terjadi pencetakan uang baru secara berlebihan. Contoh terkini adalah yang sedang dialami oleh Daerah Zimbabwe dengan inflasi diatas seratus ribu persen per tahun.

Penghitungan nilai inflasi di Indonesia didasarkan pada rasio perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual di pasar antara suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Bahan dasar penyusunan inflasi adalah Survei Biaya Hidup (SBH) (*Cost of Living Survey*). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali. Perubahan terakhir yang dilakukan untuk mengganti paket komoditas dan diagram timbang, adalah dari Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2007=100 menjadi IHK tahun dasar 2012=100. Selain dari untuk menentukan paket komoditas, hasil SBH juga digunakan untuk menghitung Diagram Timbang (*Weighting Diagram*).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah *Laspeyres* yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*International Labour Organisation/ILO*). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Rumah Tangga. IHK diperoleh melalui perbandingan nilai konsumsi pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi dasar hasil SBH, dengan persamaan sebagai berikut:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}}$$

dimana:

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)

$P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)

$P_{oi} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar

k = Jumlah jenis barang paket komoditas

Rumus Inflasi:

a. Inflasi Bulanan:

$$\frac{IHK \text{ bulan } (n) - IHK \text{ bulan } (n-1)}{IHK \text{ bulan } (n-1)} \times 100$$

b. Inflasi Tahunan (*year on year*):

$$\frac{IHK \text{ bulan } (n) \text{ tahun } (T) - IHK \text{ bulan } (n) \text{ tahun } (T-1)}{IHK \text{ bulan } (n) \text{ Tahun } (T-1)} \times 100$$

Selain untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa, IHK juga mempunyai kegunaan antara lain untuk menentukan pendapatan sebenarnya (*real income*) seseorang, melihat penurunan penjualan atau data series lain, menentukan kekuatan tukar Dollar dan menentukan pertambahan biaya hidup.

2.2 Kemiskinan

Indeks Kemiskinan adalah proporsi populasi yang baku hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, yang dinyatakan dalam persen. Tujuan yang paling penting dari ukuran kemiskinan adalah untuk memungkinkan dilakukannya perbandingan kemiskinan. Ini dibutuhkan untuk keseluruhan penilaian progres suatu daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan/atau mengevaluasi kebijakan atau

projek tertentu. Kasus terpenting dalam perbandingan kemiskinan adalah profil kemiskinan yang menunjukkan bagaimana ukuran kemiskinan agregat dapat dibentuk ke dalam ukuran-ukuran kemiskinan untuk sub-sub kelompok populasi seperti menurut wilayah tempat tinggal, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, atau kelompok etnis. Profil kemiskinan yang baik dapat membantu menunjukkan banyaknya aspek kebijakan pengurangan kemiskinan, seperti prioritas pengeluaran publik secara sektoral atau regional. Perbandingan kemiskinan juga dapat dibuat dari waktu ke waktu, dalam menilai seluruh kinerja/penampilan dari sudut pandang si miskin.

Ukuran kemiskinan merupakan suatu pertimbangan yang nyata untuk melihat pelaksanaan pembangunan. Pemberantasan kemiskinan meninggalkan tantangan utama bagi para pengambil keputusan. Lebih jauh, suatu titik pandang integratif yang secara simultan mempertimbangkan isu-isu pembangunan, penggunaan sumber daya dan kualitas lingkungan, serta kesejahteraan rakyat harus diambil jika progres yang berkelanjutan ingin dicapai. Indeks kemiskinan menangkap prevalensi kemiskinan dengan mengukur proporsi penduduk yang konsumsinya (atau ukuran baku hidup yang lebih layak lainnya) berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan di dalam indikator ini mengakibatkan bertambah buruknya situasi kemiskinan dengan semakin membesarnya proporsi penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun penghitungan GKM dan GKNM adalah sebagai berikut:

- a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain)
- b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Secara umum, indikator ini berkaitan dengan banyak ukuran pembangunan yang lain, misalnya, angka migrasi neto, angka melek huruf, PDRB perkapita, dan penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah kering. Secara khusus, indeks kemiskinan (*Head Count Index*) berasosiasi erat dengan Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan kwadrat Indeks Kesenjangan Kemiskinan yang menangkap secara sukses aspek yang lebih mendetil mengenai situasi kemiskinan. Indeks kemiskinan mengukur seberapa jauh/luas kemiskinan yang terjadi, Indeks kesenjangan kemiskinan mengukur seberapa miskin si miskin tersebut, dan Kwadrat indeks kesenjangan kemiskinan mengukur beratnya kemiskinan dengan memberi bobot lebih pada yang termiskin dari yang miskin.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai yang ditimbulkan oleh aktivitas faktor-faktor produksi dalam mengubah atau memproses bahan-bahan baku/penolong sehingga lebih dekat kepada pengguna; atau nilai barang/jasa yang ditimbulkan oleh

faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. PDRB didapatkan dengan cara menghitung semua transaksi ekonomi yang terjadi di dalam wilayah domestik suatu daerah, dan dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut. Penyajian angka PDRB umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*).

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), dan perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Metode yang dipakai dalam menghitung PDRB Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

a. Metode Langsung, Dalam metode ini ada dua cara/pendekatan yang dipakai dalam menghitung PDRB yaitu:

- 1. Metode Pendekatan Produksi,** yaitu menghitung nilai tambah dari semua sektor ekonomi dimana nilai tambah itu diperoleh setelah mengurangkan nilai produksi dengan biaya antara. Dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NTB = NPh_p - BA$$

dimana:

NTB = Nilai Tambah Bruto

NPh_p = Nilai Produksi pada harga produsen

BA = Biaya Antara

Apabila NPh_p sulit untuk diketahui karena sulit memperoleh data harga produsen, maka NPh_p dihitung sebagai berikut:

$$NPh_p = NPh_k - TTM$$

dimana:

NPh_k = Nilai Produksi pada harga konsumen/eceran

TTM = Biaya Pemasaran dan angkutan (*trade and transport margin*)

2. Metode Pendekatan Pendapatan, yaitu menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NTB = NTN + Pst$$

dimana:

NTB = Nilai Tambah Bruto

NTN = Nilai Tambah Neto

Pst = Penyusutan (depresiasi barang modal)

Nilai tambah neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$NTN = UG + SU + Ptl$$

dimana:

UG = Upah dan gaji (biaya tenaga kerja)

SU = Surplus Usaha, yang terdiri atas sewa tanah, bunga neto, dan profit

Ptl = Pajak tak langsung neto (setelah subsidi pemerintah dikeluarkan)

b. Metode Tidak Langsung

Pada cara ini penghitungan dilakukan dengan mengalokasikan PDRB atau nilai tambah dari setiap sektor dan subkategori komoditas/kegiatan usaha dari lingkup nasional dan multiregional ke dalam angka regional dengan menggunakan indikator yang relevan.

1. Metodologi Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan 2010 digunakan beberapa cara yaitu,

- a. Cara Revaluasi**, yaitu menilai kembali PDRB sesuai dengan harga pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2010). Baik produksi, biaya antara, penyusutan maupun pajak tidak langsung dinilai dengan harga pada tahun dasar tersebut, dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NPhk = P \times H_k$$

dimana:

$NPhk$ = Nilai Produksi Harga Konstan

P = Produksi (volume)

H_k = Harga Konstan

- b. Cara Deflasi/Deflasi Ganda**, dalam hal ini yang dideflasikan adalah nilai produksi (output) dan biaya antaranya, kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan dihitung dengan cara mengurangi nilai produksi dengan biaya antara, dengan menggunakan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NPhk = (NPhb/Id) \times 100$$

$$NTBhk = (NTBhb/Id) \times 100$$

dimana:

$NPhk$ = Nilai Produksi Harga Konstan 2010

NP_{hb} = Nilai Produksi Harga Berlaku

NTB_{hk} = Nilai Tambah Bruto Harga Konstan 2010

NTB_{hb} = Nilai Tambah Bruto Harga Berlaku

I_d = Indeks Deflator (Indikator)

Indeks deflator (indikator) merupakan indeks dari kegiatan yang diperkirakan erat kaitannya dengan sektor/lapangan usaha yang bersangkutan. Deflasi Ganda dilakukan apabila dalam deflasi masih diperlukan indikator-indikator lainnya yang diperkirakan juga memiliki kaitan erat dengan kegiatan sektor tersebut.

- c. **Cara Ekstrapolasi**, yaitu menghitung nilai tambah masing-masing tahun dengan mengalikan nilai pada tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing kegiatan/komoditas yang relevan, dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$N_{phk} = (NP_{hb} / I_e) \times 100$$

$$NTB_{hk} = (NTB_{hb} / I_e) \times 100$$

dimana:

N_{phk} = Nilai Produksi Harga Konstan 2010

NP_{hb} = Nilai Produksi Harga Berlaku

NTB_{hk} = Nilai Tambah Bruto Harga Konstan 2010

NTB_{hb} = Nilai Tambah Bruto Harga Berlaku

I_e = Indeks Ekstrapolasi (indikator)

2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.
2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar daerah berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat

menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.5 Distribusi Pendapatan

Indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu daerah adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva, yang disebut dengan Kurva Lorenz. Sumbu horizontal pada Kurva Lorenz melambangkan presentase kumulatif penduduk. Sumbu vertikalnya melambangkan persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk. Garis diagonal di tengah kurva adalah "garis pemerataan sempurna", karena semua titik pada garis tersebut adalah posisi di mana pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, yaitu persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Koefisien Gini adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang yang diarsir dengan luas segitiga. Daerah yang diarsir menggambarkan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Apabila Kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal, berarti ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar. Apabila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah yang diarsir akan bernilai nol (daerah tersebut sama dengan garis diagonal), sehingga nilai koefisien sama dengan nol. Apabila hanya satu pihak saja yang menerima pendapatan maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga nilai koefisien sama dengan satu. Jika angka Koefisien Gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan

semakin merata, sebaliknya bila mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Secara lebih lengkap, kriteria penilaian koefisien Gini ratio adalah sebagai berikut:

1. Gini ratio $< 0,4$ tingkat ketimpangan rendah
2. $0,4 < \text{Gini ratio} < 0,5$ tingkat ketimpangan moderat
3. Gini ratio $> 0,5$ tingkat ketimpangan tinggi

Dalam menilai distribusi pendapatan nasional terdapat cara lain di samping perhitungan. Koefisien Gini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia (*World Bank*). Yang diukur oleh Bank Dunia adalah besarnya kontribusi dari 40 persen penduduk termiskin terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional. Kriteria tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

1. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya lebih kecil daripada 12 persen dari keseluruhan pengeluaran maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi
2. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya berada antara 12 persen s.d. 17 persen dari keseluruhan pengeluaran maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang moderat
3. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya lebih besar daripada 17 persen dari keseluruhan pengeluaran maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang rendah

2.6 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu tumpuan perolehan devisa bagi sebagian besar wilayah di Indonesia, demikian juga dengan Kabupaten Bintan. Dengan gugusan kepulauan yang dikelilingi oleh sumber daya kelautan yang indah dan beragam menjadikan kabupaten ini wajib menjadikan pariwisata sebagai

sumber pendapatan daerah yang potensial. Tidak hanya berjajarnya pantai-pantai yang indah namun juga panorama bawah laut yang tentu saja menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Semakin berkembangnya sektor pariwisata sangat berpengaruh pada sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Pariwisata adalah sebuah rangkaian simbiosis mutualisme berbagai sektor ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti sektor kerajinan, restoran, agen perjalanan wisata, bahkan pertanian sebagai penyedia bahan baku makanan. Di samping itu penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata juga cukup besar.

Pada publikasi ini ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan dan persamaan persepsi yaitu:

1. **Usaha akomodasi** adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lain dengan pembayaran.
2. **Hotel berbintang** adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Persyaratan tersebut antara lain keadaan fisik seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olah raga yang disediakan seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.
3. **Usaha akomodasi lainnya (Hotel non Bintang)** adalah semua usaha akomodasi yang tidak termasuk hotel berbintang, yang terdiri atas hotel melati, penginapan remaja (*youth hostel*), pondok wisata (*home stay*), perkemahan, dan jasa akomodasi lainnya seperti motel, losmen, dan sebagainya.

4. **Tingkat Hunian Kamar (TPK)** adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen).
5. **Rata-rata Lama Menginap** adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibanding banyaknya tamu yang menginap.
6. **Wisatawan Mancanegara (Wisman)** adalah orang yang melakukan perjalanan di luar daerah tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di daerah yang dikunjungi dan tujuan perjalanan tidak untuk bekerja atau memperoleh penghasilan.

2.7 Ekspor dan Impor

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan menjual barang atau jasa keluar negeri maupun keluar dari Kabupaten Bintan. Sedangkan Impor adalah kegiatan perdagangan membeli barang atau jasa dari luar negeri atau dari luar Kabupaten Bintan. Pencatatan Statistik Ekspor meliputi seluruh barang ke luar negeri dari wilayah Kabupaten Bintan, baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil antara lain:

- a. Sebagian ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk dalam statistik ekspor.
- b. Barang-barang yang diolah di luar negeri tetap dicatat sebagai ekspor, meskipun hasil olahan barang tersebut akan kembali masuk ke wilayah Indonesia.
- c. Bantuan barang kredit lunak, hadiah dan sebagainya.

Pencatatan Statistik Impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Bintan baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil antara lain :

- a. Sebagian impor kapal laut dan pesawat udara beserta suku cadangnya termasuk dalam statistik impor.
- b. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (re-ekspor).

Barang-barang di bawah ini tidak termasuk dalam statistik ekspor impor antara lain :

- a. Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang
- b. Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya.
- c. Barang-barang yang diekspor/diimpor untuk perwakilan (kedutaan) suatu daerah.
- d. Barang-barang untuk ekspedisi dan ekshibisi/pameran
- e. Sebagian barang-barang yang langsung diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- f. Pembungkus/peti kemas
- g. Uang dan surat-surat berharga
- h. Barang-barang contoh